



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Proyek Jalan Tol Bandung, Jabar Mulai Putus Asa		
Date	25 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	8	Article Size	
Journalist	K57	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► PROYEK JALAN TOL BANDUNG

Jabar Mulai Putus Asa

BANDUNG—Pemprov Jawa Barat mengaku belum bisa berbuat banyak memulai pembicaraan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) karena masih terbelit beleid Badan Pertanahan Nasional (BPN).

redaksi@elnis.co.id

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan Bappenas menyetujui proyek BIUTR dari PPP Book 2013, bukan karena pihaknya tidak bisa

- Kesulitan menerbitkan surat penetapan lokasi BIUTR karena BPN tidak menerbitkan rekomendasi teknis.
- Pemprov Jabar menegaskan meski dicoret dari PPP Book, proyek BIUTR masih ditawarkan kepada investor.

menjaring investor swasta. "BIUTR dituntut karena ada 16 kementerian dan lembaga yang belum merespons surat Pemprov Jabar," katanya di Bandung, Kamis (24/10).

Menurutnya, Pemprov Jabar kesulitan membebaskan lahan karena masih berkulat pada adanya tanah negara yang butuh kepastian hukum.

Kesulitan menerbitkan surat penetapan lokasi BIUTR yang dikenal dengan SP21R, karena BPN tidak menerbitkan rekomendasi teknis kepada gubernur. Hampir semua dari 16 kementerian belum merespons terhadap peraturan kepala BPN RI No. 2/2011.

Beleid tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2/2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan

dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perumahan Penggunaan Tanah yang ditetapkan 4 Februari 2011.

Persoalan tersebut membuat posisi pembebasan lahan BIUTR sepanjang 27,26 kilometer tersebut tidak bisa dilakukan. Surat penelapan itu mensyaratkan harus ada evaluasi teknis dari BPN.

Sementara itu, lembaga yang mengurus pertanahan tersebut enggan melakukan evaluasi jika belum ada izin prinsip dari kementerian. "Kementerian tidak mengemahkan, kami tidak bisa apa-apa," ujarnya.

Terhambatnya proyek ini dilalui melanggar prinsip proyek MP3MI yang mengharuskan tidak adanya hambatan. Setelah Pemprov Jabar menelusuri ke Kementerian Keuangan diketahui bahwa kementerian dan lembaga tersebut belum mengajukan permintaan soal pemberian izin prinsip itu.

Denny meminta surat arahan BPN tersebut dikembalikan bagi proyek tersebut, dan pihaknya menolak proyek BIUTR dihentikan karena kebutuhan Bandung Raya akan infrastruktur jalan tol

dalam kota sudah sangat mende-sak.

Dihubungi terpisah, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar mengatakan meski sudah dicoret dari PPP Book, proyek BIUTR masih ditawarkan Jabar kepada para investor.

Menurutnya, proyek tersebut masih berada dalam daftar proyek infrastruktur Jabar seperti Cisumdawu, BJB Kertajati, naktivasi kereta api, dan tol Cileunyi-Tasik. "Keseluruhan pembangunan infrastruktur itu menjadi prioritas," katanya.

Untuk mengatasi masalah transportasi, Pemprov Jabar telah menetapkan arah kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur yaitu dengan meningkatkan kualitas infrastruktur strategis antara lain pengembangan jaringan primer, jaringan tol dalam kota maupun luar kota, jaringan kereta api.

"Dikembangkan juga bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional, serta sistem angkutan umum massal," paparanya.

PUNYA KEWENANGAN
Dedy mengungkapkan sesuai Undang-Undang No. 33/2004

tentang Jalan, pemerintah pusat dan pemda memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelesaian jalan baik itu jalan tol atau nontol.

Saat ini jalan nasional dan provinsi dalam kondisi 90%, akan tetapi untuk jalan kewenangan kabupaten/kota masih di bawah 75%.

Proyek BIUTR yang diprediksi memecah kemacetan Kota Bandung akan terbagi dalam dua segmen. Pertama, Pasteur-Cileunyi dengan panjang 20,6 km, merupakan segmen Timur-Darat. Kedua, Ujungberung-Gedebage sepanjang 6,7 km yang disebut segmen utara-selatan.

Proyek yang sedianya dimulai tahun lalu pada tahap awal akan dilakukan di ruas Pasteur-Casbu sepanjang 5,5 km, dan Suкарno Hatta-Akses Tbl (KM 149+100) sepanjang 4 km. Tahap awal ini akan menggunakan anggaran dari Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar US\$150 juta.

Adapun instansi yang terkena jalur BIUTR di antaranya Kementerian ESDM, Badan Kependidikan dan Pengawasan Pegawai-an Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (K57) 2